



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/devvsv56

Hal. 562-568

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Problematika Muslim Minoritas di Myanmar: Historisitas, Identitas, dan Diskriminasi terhadap Rohingya

Saepul Basor

Universitas Persatuan Islam

*Email Korespondensi: saepulbasor@gmail.com

Diterima: 14-08-2026 | Disetujui: 19-08-2026 | Diterbitkan: 21-08-2026

ABSTRACT

This study examines the issues faced by the Muslim minority in Myanmar, focusing on aspects of history, identity, discrimination, and restrictions on social and religious life particularly those experienced by the Rohingya community. The study employs a qualitative method using a library research approach. Data were gathered from various written sources including books, scholarly journals, articles, and other relevant materials and subsequently analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the presence of Muslims in Myanmar dates back to the 7th century CE, established through trade, missionary work, migration, and political relations in the Arakan region. Over time, the political status of Myanmar's Muslim community shifted, particularly following the country's independence in 1948 and the military takeover in 1962. The challenges faced by the Rohingya community stem not solely from religious differences but also from issues regarding ethnic identity, citizenship, nationalism, and state policy. These conditions have given rise to various forms of discrimination and restrictions across social, political, and religious spheres, including limitations on places of worship and religious activities. Thus, the situation of the Muslim minority in Myanmar is a multidimensional issue shaped by historical, political, identity-related, religious, and state-policy factors.

Keywords: Muslim Minority, Myanmar, Rohingya, Identity, Discrimination.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika Muslim minoritas di Myanmar dengan menitikberatkan pada aspek historisitas, identitas, diskriminasi, serta pembatasan kehidupan sosial dan keagamaan, khususnya yang dialami masyarakat Rohingya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber relevan lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Muslim di Myanmar telah berlangsung sejak abad ke-7 M melalui aktivitas perdagangan, dakwah, migrasi, dan hubungan politik di wilayah Arakan. Dalam perkembangannya, masyarakat Muslim Myanmar mengalami perubahan posisi politik, terutama setelah kemerdekaan Myanmar pada 1948 dan pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 1962. Problematika masyarakat Rohingya tidak semata-mata berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga berhubungan dengan persoalan identitas etnis, kewarganegaraan, nasionalisme, serta kebijakan negara. Kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan, termasuk pembatasan terhadap tempat ibadah dan aktivitas keagamaan. Dengan demikian, problematika Muslim minoritas di Myanmar merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, identitas, agama, dan kebijakan negara.

Kata kunci: Muslim Minoritas, Myanmar, Rohingya, Identitas, Diskriminasi.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Basor, S. (2026). Problematika Muslim Minoritas di Myanmar: Historisitas, Identitas, dan Diskriminasi terhadap Rohingya. Jurnal Teologi Islam, 2(2), 562-568. <https://doi.org/10.63822/devvsv56>

PENDAHULUAN

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki keragaman etnis dan agama. Di samping masyarakat mayoritas yang beragama Buddha, terdapat berbagai kelompok masyarakat Muslim yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Myanmar. Keberadaan Islam di Myanmar, khususnya di wilayah Arakan, memiliki sejarah yang panjang. Islam diperkirakan telah hadir di wilayah tersebut sejak abad ke-7 M melalui aktivitas perdagangan dan dakwah para pedagang Muslim. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat Muslim di Myanmar bukan merupakan perkembangan baru, tetapi telah berlangsung sejak periode awal hubungan antara Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Perkembangan Islam di Myanmar berlangsung melalui proses sejarah yang kompleks. Wilayah Arakan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu kawasan yang menghubungkan dunia Asia Selatan dengan Asia Tenggara. Dalam perkembangannya, masyarakat Muslim kemudian menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat Myanmar. Selain komunitas Rohingya, terdapat pula kelompok Muslim keturunan India yang menetap dan berkembang di berbagai wilayah Myanmar. Wan Kamal Mujani menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim keturunan India tetap mempertahankan unsur budaya dan identitas asal mereka dalam kehidupan sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Myanmar memiliki latar belakang yang beragam dan tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang sepenuhnya homogen.

Posisi masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas kemudian menjadi semakin kompleks akibat perkembangan politik Myanmar. Perubahan politik setelah kemerdekaan pada tahun 1948 serta pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada tahun 1962 memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan berbagai kelompok minoritas. Dalam kajiannya mengenai Muslim Myanmar, Wan Kamal Mujani memberikan perhatian terhadap perkembangan umat Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan serta berbagai bentuk diskriminasi yang muncul setelah militer mengambil alih kekuasaan. Perubahan politik tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam memahami mengapa persoalan Muslim minoritas di Myanmar berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Salah satu kelompok Muslim yang menghadapi persoalan paling kompleks adalah masyarakat Rohingya di Arakan. Persoalan Rohingya berkaitan dengan identitas etnis, agama, hubungan dengan pemerintah, dan posisi mereka dalam kehidupan politik Myanmar. Perdebatan mengenai identitas Rohingya kemudian tidak hanya menghasilkan persoalan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas. Riza Sihbudi menempatkan Rohingya sebagai salah satu kasus penting dalam pembahasan mengenai problematika minoritas Muslim di Asia Tenggara. Dengan demikian, persoalan Rohingya perlu dipahami sebagai bagian dari persoalan minoritas yang memiliki dimensi sejarah, politik, sosial, dan keagamaan.

Diskriminasi terhadap masyarakat Muslim Myanmar juga berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Dalam berbagai periode pemerintahan, masyarakat Muslim menghadapi pembatasan dalam menjalankan aktivitas keagamaannya. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan tempat ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat Muslim. Dalam pembahasan mengenai kondisi Muslim Myanmar, Riza Sihbudi mengutip pandangan Moshe Yegar bahwa pertentangan antara pemerintah dan masyarakat Burma dengan kelompok Muslim minoritas, termasuk Rohingya, berkaitan dengan adanya perbedaan karakteristik antara kebiasaan masyarakat Burma dan budaya Islam. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan

minoritas Muslim tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga dengan perbedaan identitas budaya dan agama.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim kemudian berkembang melampaui persoalan keagamaan. Posisi mereka sebagai kelompok minoritas juga berkaitan dengan akses terhadap kehidupan sosial dan ekonomi serta pengakuan terhadap identitas mereka. Dalam konteks Rohingya, persoalan identitas menjadi semakin penting karena status dan keberadaan mereka di Myanmar terus menjadi bagian dari perdebatan politik. Kondisi tersebut membuat masyarakat Rohingya berada dalam posisi yang rentan dan mengalami berbagai pembatasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Problematika Muslim minoritas Myanmar juga menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Perbedaan agama tidak dengan sendirinya menghasilkan konflik, tetapi dapat menjadi semakin problematis ketika berhubungan dengan politik identitas, kekuasaan negara, dan kebijakan terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu, persoalan Muslim Myanmar tidak tepat jika hanya dipahami sebagai konflik agama antara masyarakat Muslim dan Buddha. Persoalan tersebut memiliki akar yang lebih luas, yaitu sejarah politik, identitas etnis, kebijakan negara, dan posisi kelompok minoritas dalam kehidupan bernegara.

Persoalan tersebut pada akhirnya menarik perhatian masyarakat internasional dan kawasan Asia Tenggara. Myanmar merupakan salah satu negara anggota ASEAN sehingga persoalan yang terjadi di dalam negeri Myanmar memiliki konsekuensi terhadap hubungan regional. Namun, upaya ASEAN dalam menangani persoalan internal Myanmar menghadapi keterbatasan karena adanya prinsip *non-interference* dalam hubungan antarnegara anggota. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan yang berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas menjadi sulit ditangani secara langsung melalui mekanisme regional.

Berdasarkan uraian tersebut, problematika Muslim minoritas Myanmar merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama, tetapi juga mencakup sejarah keberadaan Muslim, identitas etnis, perkembangan politik Myanmar, diskriminasi, serta posisi kelompok minoritas dalam kehidupan sosial dan politik. Masyarakat Rohingya menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, pembahasan mengenai problematika Muslim minoritas Myanmar penting dilakukan untuk memahami latar belakang historis, bentuk persoalan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang menyebabkan posisi masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas menjadi rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan historisitas serta problematika Muslim minoritas di Myanmar, khususnya masyarakat Rohingya. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan informasi mengenai sejarah keberadaan Muslim, pembentukan identitas, diskriminasi, serta pembatasan kehidupan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dan bentuk problematika yang dihadapi Muslim minoritas di Myanmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas Muslim Myanmar dan Problematika Pembentukan Identitas

Dalam rentang waktu yang begitu panjang semenjak abad ke-7 M, di mana orang-orang Islam datang ke wilayah Myanmar sebagai pedagang, pelaut, pelancong, pendakwah, tawanan perang, dan sebagai pekerja (pegawai) yang mengabdikan kepada setiap penguasa, semenjak periode kerajaan dan pemerintahan Burma British (Inggris) sampai dengan terbentuknya negara bangsa pada tahun 1948, kaum Muslim di Myanmar telah membentuk beberapa kelompok Muslim Burma. Mereka tidak tinggal di satu kawasan, melainkan terpisah dan hidup mengelompok berdasarkan etnis dan garis keurunan. Kelompok-kelompok Muslim Burma ini memiliki kedudukan yang berbeda dalam masyarakat Myanmar kontemporer.

Sejarah tersebut menjadi penting karena salah satu persoalan utama yang muncul dalam kasus Rohingya adalah perdebatan mengenai asal-usul dan identitas mereka. Persoalan identitas tidak hanya menyangkut bagaimana suatu komunitas mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana negara mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai bagian dari bangsa. Dalam konteks Rohingya, perbedaan antara identitas yang diklaim oleh komunitas dengan identitas yang diberikan oleh negara kemudian mempunyai konsekuensi politik dan hukum.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena masyarakat Muslim Myanmar sendiri tidak merupakan kelompok yang homogen. Selain Rohingya di Rakhine, terdapat kelompok Muslim keturunan India dan kelompok Muslim lainnya yang berkembang di wilayah berbeda. Wan Kamal Mujani menunjukkan adanya komunitas Muslim keturunan India yang tetap mempertahankan sejumlah unsur budaya asal dalam kehidupan mereka. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa istilah “Muslim Myanmar” mencakup kelompok dengan sejarah, latar belakang etnis, dan pengalaman sosial yang berbeda.

Namun, dalam perkembangan politik modern Myanmar, identitas keagamaan dan etnis semakin berhubungan dengan konstruksi nasionalisme. Ketika identitas tertentu dipandang lebih dekat dengan definisi bangsa yang dominan sementara identitas lainnya dianggap asing, perbedaan sosial dapat berkembang menjadi persoalan politik. Dalam kasus Rohingya, persoalan tersebut kemudian berhubungan langsung dengan pengakuan negara terhadap keberadaan mereka.

Karena itu, problematika Rohingya tidak cukup dijelaskan melalui kategori “minoritas agama”. Mereka berada pada persimpangan antara minoritas agama, identitas etnis, kewarganegaraan, dan nasionalisme. Perspektif ini penting agar pembahasan tidak berhenti pada narasi konflik antara Muslim dan Buddha, tetapi dapat menjelaskan bagaimana identitas suatu kelompok menjadi persoalan politik ketika berhadapan dengan negara.

Posisi Muslim di Myanmar

Keberadaan Muslim di Myanmar memiliki sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan perkembangan perdagangan serta hubungan politik di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Arakan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu kawasan yang mempertemukan masyarakat Burma dengan komunitas dari Bengal dan wilayah Asia Selatan. Perkembangan tersebut kemudian membentuk komunitas Muslim yang memiliki karakter sosial dan politik tersendiri.

Dalam perkembangannya, masyarakat Muslim di Arakan tidak hanya menjadi kelompok keagamaan, tetapi juga memainkan peranan dalam kehidupan politik kerajaan. Keberadaan mereka dapat dilihat dari keterlibatan Muslim dalam struktur pemerintahan dan militer Arakan. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa hubungan antara masyarakat Muslim dan kerajaan Arakan memiliki sejarah yang cukup kompleks dan tidak selalu berbentuk konflik.

Pada periode menjelang kemerdekaan Burma, masyarakat Muslim juga terlibat dalam dinamika politik nasional. Setelah kemerdekaan 1948, sejumlah tokoh Muslim bahkan memperoleh posisi dalam pemerintahan dan parlemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada periode awal kemerdekaan terdapat ruang politik yang relatif terbuka bagi sebagian masyarakat Muslim.

Namun, keadaan tersebut mengalami perubahan setelah kudeta militer pada 1962. Perubahan rezim politik membawa konsekuensi terhadap hubungan pemerintah dengan kelompok minoritas. Kebijakan nasionalisme yang semakin kuat menyebabkan identitas kelompok minoritas, termasuk Muslim Rohingya, berada dalam posisi yang semakin rentan.

Problematika Identitas Muslim Rohingya

Persoalan yang kemudian berkembang bukan sekadar perbedaan agama antara Muslim dan Buddha, tetapi juga persoalan mengenai identitas dan posisi politik masyarakat Rohingya. Moshe Yegar mencatat bahwa masyarakat Muslim Arakan sendiri menggunakan sejumlah istilah identitas, termasuk Rohingya atau Rohingya, terutama di wilayah utara Arakan.

Persoalan identitas tersebut menjadi semakin penting karena berkaitan dengan pengakuan politik. Ketika identitas suatu kelompok dipersoalkan, konsekuensinya dapat memengaruhi kedudukan mereka dalam kehidupan bernegara. Dalam kasus Rohingya, persoalan identitas kemudian berhubungan dengan status kewarganegaraan, hak politik, dan akses terhadap kehidupan sosial.

Dengan demikian, problematika Rohingya tidak tepat dipahami hanya sebagai konflik agama. Persoalan tersebut merupakan pertemuan antara identitas etnis, agama, nasionalisme, dan kepentingan politik negara. Kajian Yegar memperlihatkan bahwa perkembangan komunitas Muslim Arakan setelah kemerdekaan juga berkaitan dengan tuntutan mengenai posisi politik dan pengaturan wilayah tempat mereka menjadi kelompok mayoritas.

Diskriminasi dan Pembatasan Kehidupan Sosial

Perubahan politik setelah 1962 semakin mempersempit ruang kehidupan kelompok Muslim. Kebijakan pemerintah militer menyebabkan berbagai kelompok minoritas mengalami tekanan politik, sementara masyarakat Muslim Rohingya menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena identitas agama dan etnis mereka.

Riza Sihbudi melihat persoalan minoritas Muslim di Asia Tenggara sebagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara kelompok mayoritas, minoritas, dan negara. Dalam kasus Rohingya, ketegangan tersebut berkembang menjadi persoalan politik dan sosial yang sulit dipisahkan dari kebijakan pemerintah Myanmar.

Pembatasan terhadap masyarakat Muslim juga terlihat dalam kehidupan keagamaan. Rianne ten Veen mencatat adanya penghancuran masjid dan pembatasan pembangunan kembali tempat ibadah Muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa problematika minoritas tidak hanya menyangkut akses politik, tetapi juga menyentuh kehidupan keagamaan masyarakat. Ketika tempat ibadah dan lembaga pendidikan agama mengalami pembatasan, maka yang terpengaruh bukan hanya kebebasan menjalankan ibadah, tetapi juga keberlangsungan identitas dan kehidupan sosial komunitas.

KESIMPULAN

Problematika Muslim minoritas di Myanmar merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Keberadaan masyarakat Muslim di Myanmar, khususnya di wilayah Arakan, telah berlangsung sejak berabad-abad lalu melalui aktivitas perdagangan, migrasi, dakwah, dan hubungan politik. Namun, perkembangan politik Myanmar, terutama setelah kudeta militer tahun 1962, turut memengaruhi posisi masyarakat Muslim sebagai kelompok minoritas.

Masyarakat Rohingya menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena menghadapi persoalan identitas etnis dan agama yang berhubungan dengan status kewarganegaraan serta pengakuan politik. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pembatasan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Pembatasan terhadap tempat ibadah dan aktivitas keagamaan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi Muslim minoritas tidak hanya berkaitan dengan konflik antaragama, tetapi juga dengan kebijakan negara, nasionalisme, politik identitas, dan hubungan mayoritas-minoritas.

Dengan demikian, problematika Muslim minoritas di Myanmar, khususnya Rohingya, tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik antara Muslim dan Buddha. Persoalan tersebut merupakan hasil dari keterkaitan faktor historis, identitas etnis, agama, politik, dan kebijakan negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah dan kompleksitas identitas masyarakat Muslim menjadi penting dalam melihat persoalan Rohingya secara lebih objektif serta dalam mendorong terciptanya kehidupan yang menjunjung kesetaraan, hak-hak minoritas, dan kebebasan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Asep Achmad. *Sejarah Islam di Subkawasan Indochina*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2023.
- Mujani, Wan Kamal, ed. *Minoriti Muslim: Gambaran dan Harapan Menjelang Abad ke-21*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Sihbudi, Riza. *Problematic Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani dan Rohingya*. Jakarta: PPW-LIPI, 2000.
- Veen, Rianne ten, dan Islamic Human Rights Commission. *Myanmar's Muslims: The Oppressed of the Oppressed*. Great Britain: Islamic Human Rights Commission, 2005.
- Yegar, Moshe. *Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*. Lanham, MD: Lexington Books, 2002.